



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 2 NOMOR 2 (NOVEMBER 2021)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA MENJELANG 20 TAHUN OTONOMI DAERAH

Iis Surgawati^{a*}

^a Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

[*iisurgawati@unsil.ac.id](mailto:iisurgawati@unsil.ac.id)

Diterima: Agustus 2021. Disetujui: Oktober 2021. Dipublikasikan: November 2021.

ABSTRACT

This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization in district/city governments in Indonesia by estimating a map and testing whether the degree of fiscal decentralization of the city government is higher than the district government, as well as to identify the factors that influence it before the 20 years of the implementation of regional autonomy. The data used is secondary data with a cross-section structure in the form of the Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) on audited Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) for the 2019 fiscal year from 81 district governments and 19 city governments as samples published by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) of the Republic of Indonesia. To estimate the degree of fiscal decentralization map used proportion and average estimation techniques, while to distinguish the degree of fiscal decentralization of districts and cities used Two Independent Sample t-Test. Multiple linear regression analysis is used to identify the factors that are thought to have an effect on the degree of fiscal decentralization. With a significance level $\alpha = 5\%$, the results of the study show that among 508 regencies/cities spread across 33 provinces (except DKI Jakarta) it is estimated that only around 32 to 90 regions are included in the autonomous category, while the average degree of fiscal decentralization for all districts/cities city is estimated at 10.33% to 13.31%. Another finding of this study is that there is significant support for the assumption that the degree of fiscal decentralization of cities is higher than districts. Furthermore, it was also found that the regional characteristics partially represented by the contribution of the industrial sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), total assets, dependency level, local government status and the results of audit opinions had a significant effect on the degree of fiscal decentralization. Together, these factors have a significant effect.

Keywords: Degree of Fiscal Decentralization, Regional Autonomy, Two Independent Sample T-Test, Multiple Linear Regression

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan mengestimasi peta dan menguji apakah derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya menjelang 20 tahun diberlakukannya otonomi daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder berstruktur silang tempat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *audited* Tahun Anggaran 2019 dari 81 pemerintah kabupaten dan 19 pemerintah kota sebagai sampel yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Untuk mengestimasi peta derajat desentralisasi fiskal digunakan teknik penaksiran proporsi dan penaksiran rata-rata sedangkan untuk membedakan derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota digunakan *Two Independent Sample t-Test*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap derajat

desentralisasi fiskal. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 508 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) diperkirakan baru sekitar 32 sampai 90 daerah saja yang sudah termasuk kategori otonom sedangkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal seluruh kabupaten/kota diperkirakan sebesar 10,33% sampai dengan 13,31%. Temuan lain penelitian ini adalah adanya dukungan yang signifikan atas dugaan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dibanding kabupaten. Selanjutnya ditemukan pula bahwa pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ karakteristik daerah yang diwakili oleh kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), total aset, tingkat ketergantungan, status pemerintah daerah dan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, *Two Independent Sample T-Test*, Regresi Linier Berganda

I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik yang berlangsung di Indonesia pada awal tahun 2001 membawa konsekuensi pada perubahan sistem keuangan negara akibat dari penyerahan dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan sistem pemerintahan dan sistem keuangan negara yang terakhir diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 serta menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut. Daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Hasan, 2014).

Dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah *pertama* berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah. *Kedua*, berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber penerimaan daerah yang *ketiga* dan *keempat*

adalah Pinjaman Daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah.

PAD harus menjadi sumber keuangan utama yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan suatu negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang penting, PAD diharapkan semakin berperan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Apalagi di era otonomi daerah saat ini upaya peningkatan PAD semakin mendesak untuk dilaksanakan mengingat salah satu tujuan kebijakan desentralisasi menurut Suparmoko, (2002:16) adalah meningkatkan PAD dan mengurangi sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Meskipun kemandirian keuangan daerah tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintah daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari PAD, tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah tetap merupakan indikasi derajat desentralisasi fiskal (Kuncoro, 2004).

Tahun ini pemberlakuan sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah genap 20 tahun. Namun usia dua dasa wara nampaknya masih belum mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan sendiri sebagaimana diamanatkan undang-undang. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, porsi PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia menurut Jenis Penerimaan Tahun 2016--2019
(dalam trilyun rupiah)

Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran			
	2016	2017	2018	2019
PAD	96,3	125,2	114,3	124,5
Dana Perimbangan	513,4	493,0	513,0	537,1
Lain-lain penerimaan	118,6	135,4	148,4	179,5
Pembiayaan	80,0	60,4	61,5	90,9
Total	808,3	813,0	837,2	932,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1 memperlihatkan bahwa meskipun secara nominal angka PAD cenderung meningkat, namun pada dua tahun terakhir terjadi penurunan kontribusi hingga hampir 2%. Fenomena ini memberi indikasi menurunnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menggali potensi pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Jika diamati lebih seksama, terdapat kesenjangan yang amat mencolok antara

Tabel 2. Derajat Desentralisasi Fiskal Tertinggi dan Terendah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 (dalam %)

Tertinggi		Terendah	
Daerah	DDF	Daerah	DDF
Kab. Badung	83,46	Kab. Deiyai	0,31
Kota Surabaya	61,40	Kab. Asmat	0,36
Kota Tangerang Selatan	52,77	Kab. Tolikara	0,62
Kota Tangerang	47,39	Kab. Memberamo Raya	0,65
Kota Denpasar	46,08	Kab. Maybart	0,67
Rata-rata	58,22	Rata-rata	0,52

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diolah

Catatan: DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

Status daerah merupakan sebuah pengakuan nasional atas suatu daerah sebagai kabupaten atau kota. Pemerintah kota dengan sumber daya yang lebih baik akan mempunyai kemungkinan yang lebih baik pula dalam pelaksanaan pemerintahan daerah karena dukungan sumber daya tersebut untuk mencapai sasaran pemerintah daerah, sehingga mampu menciptakan kinerja yang lebih baik (Heriningsih dalam Suryaningsih, 2016).

Fenomena rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berdampak pada tingginya ketergantungan daerah akan bantuan dari pemerintah pusat. Setidaknya ada 5 penyebab utama rendahnya PAD (Kuncoro, 2004: 15) yaitu 1) kurang berperannya Badan Usaha Milik Daerah

kelompok daerah dengan derajat desentralisasi tertinggi dengan kelompok daerah dengan derajat desentralisasi terendah (Tabel 2). Selain selisih rata-rata derajat desentralisasi fiskal yang sangat jauh (lebih dari 50%), data tahun 2019 juga memperlihatkan bahwa empat dari lima daerah dengan derajat tertinggi adalah pemerintah kota. Pemerintah daerah yang berstatus sebagai kota cenderung mematuhi standar akuntansi karena kontrol sosial pada penduduk kota cenderung lebih kuat (Nugroho dalam Suryaningsih, 2016) sebagai dampak perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatannya.

Secara geografis, lima daerah dengan derajat desentralisasi tertinggi seluruhnya berada di wilayah Jawa dan Bali. Sementara itu lima daerah dengan derajat desentralisasi terendah merupakan pemerintah kabupaten yang seluruhnya berada di belahan Papua.

(BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah, 2) tingginya sentralisasi di bidang perpajakan, 3) meskipun cukup beragam, ternyata hanya sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan, 4) adanya kekhawatiran jika daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi akan mendorong disintegrasi dan separatisme serta 5) kelemahan pemberian subsidi.

Pendapat serupa dikemukakan Nugraha, (2019). Ia juga menambahkan bahwa upaya penguatan desentralisasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo pada pidato penjelasan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan 2019 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik

Indonesia (RI) yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan ini membuat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan daerah terhadap TKDD sebesar 80,1%, sementara kontribusi PAD hanya sekitar 12,87% saja.

Ukuran lain yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah hasil opini audit yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini tersebut terdiri dari 4 kategori yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Meskipun hanya mengukur kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang ditetapkan, namun bagaimanapun hasil opini audit menggambarkan kualitas laporan dan kinerja keuangan daerah (Prayitno, 2013).

Studi terkait kinerja desentralisasi fiskal banyak dilakukan, mulai dari pengukuran/penilaian, pemetaan hingga mengkaji hubungannya dengan karakteristik daerah dan hasil opini audit. Sumual (2017) mengukur kinerja keuangan (salah satunya derajat desentralisasi) pada pemerintah kota Tomohon. Sepanjang periode penelitian (2013 hingga 2016) diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan kota Tomohon kurang baik. Meski demikian dalam hal alokasi anggaran, kota Tomohon sudah dapat dikatakan efektif.

Kecuali kabupaten Badung, penelitian Fitriani (2014) menghasilkan penilaian kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Bali dengan kriteria paling tinggi "Sedang". Sementara Hardiana, (2020) mendapat temuan bahwa kemandirian daerah yang diantaranya tercermin dari indikator derajat desentralisasi fiskal, di kabupaten/kota di Jawa Barat masih relatif rendah meskipun terjadi peningkatan kategori.

Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Prayitno (2013) menyimpulkan bahwa pajak daerah dan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Indonesia yang diukur dengan derajat desentralisasi. Sementara Ilmiyyah (2017) menemukan bahwa secara parsial *intergovernmental revenue* yang merupakan salah satu ukuran tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan tetapi hasil opini audit, ukuran legislatif, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan.

Strategi penguatan desentralisasi fiskal dapat dilakukan jika faktor-faktor penyebab kelemahannya teridentifikasi. Dari beberapa studi diperoleh informasi bahwa karakteristik daerah ditengarai menentukan derajat desentralisasi fiskal. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan tiga permasalahan penelitian.

1. Bagaimana peta derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dari kabupaten?
3. Apakah faktor karakteristik daerah (*share* sektor industri terhadap total Produk Domestik Regional Bruto, asset daerah, ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat serta status daerah) dan hasil opini audit berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data dan menjawab tujuan penelitian. Metode deskriptif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen dalam bentuk laporan keuangan daerah dan dokumen kebijakan desentralisasi fiskal, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengestimasi model, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil pengujian.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari publikasi data *online* Badan Pusat Statistik (BPS) dan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2020 (IHPS 1 2020) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (LKPD TA 2019) yang diperoleh melalui layanan Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan (PIK BPK). Struktur data adalah *cross section data* (data silang tempat) pemerintah kabupaten/kota yang tersebar pada 33 provinsi (tanpa DKI Jakarta) yang dijadikan sampel penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan dengan *Proportional Stratified Random Sampling*

dari populasi yang terdiri 415 kabupaten dan 93 kota sehingga didapat sampel 81 kabupaten dan 19 kota. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, pengelompokan dilakukan juga berdasarkan letak geografis yaitu wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua. Gambaran sebaran kabupaten/kota pada populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Kabupaten/Kota pada Populasi dan Sampel menurut Wilayah Geografis

Wilayah	Populasi		Sampel	
	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
Jawa	84	29	16	6
Bali-Nusa Tenggara	37	4	7	1
Sumatera	120	34	23	7
Kalimantan	47	9	9	2
Sulawesi	70	11	14	2
Maluku-Papua	57	6	12	1
Jumlah	415	93	81	19

Sumber: BPK, diolah

Pemilihan sampel kabupaten/kota dari setiap wilayah dilakukan dengan *Simple Random Sampling* dengan *sampling frame* seluruh kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutan.

Derajat desentralisasi fiskal dihitung dari rasio antara PAD dengan TPD (Total Pendapatan Daerah) (Kuncoro, 2004), yang dinyatakan dalam hitungan persen sehingga ditulis dalam formulasi:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad \text{(Persamaan 1)}$$

di mana DDF = derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang (Hasan, 2014).

Angka DDF yang dihitung kemudian diinterpretasikan menjadi 6 kriteria yaitu “Sangat Kurang” jika $0,00\% \leq DDF \leq 10,00\%$, “Kurang” jika $10,10\% \leq DDF \leq$

$20,00\%$, “Sedang” jika $20,10\% \leq DDF \leq 30,00\%$. “Cukup” jika $30,10\% \leq DDF \leq 40,00\%$, “Baik” jika $40,10\% \leq DDF \leq 50\%$ dan “Sangat Baik” jika $DDF > 50\%$ (Litbang Depdagri 1991 dalam PP Hasan, 2014).

Untuk memperkirakan/mengestimasi peta DDF seluruh kabupaten/kota di Indonesia digunakan teknik menaksir proporsi baik untuk masing-masing kelompok maupun secara keseluruhan dengan rumus:

$$\frac{x}{n} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\frac{x}{n}(1-\frac{x}{n})}{n} \frac{N-n}{N-1}} \leq p \leq \frac{x}{n} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\frac{x}{n}(1-\frac{x}{n})}{n} \frac{N-n}{N-1}} \quad \text{(Persamaan 2)}$$

di mana:

- $\frac{x}{n}$ = proporsi sampel kabupaten/kota yang termasuk kriteria desentralisasi “Sangat Kurang”, “Kurang”, “Sedang”, “Cukup”, “Baik” atau “Baik Sekali”
- $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ = angka baku yang diperoleh dari tabel normal pada tingkat signifikansi α
- N = ukuran populasi (jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia)
- n = ukuran sampel

p = proporsi populasi kabupaten/kota yang termasuk kriteria desentralisasi “Sangat Kurang”, “Kurang”, “Sedang”, “Cukup”, “Baik” atau “Baik Sekali” yang akan diestimasi

Di samping itu dilakukan penaksiran rata-rata setiap kelompok dan keseluruhan DDF dengan rumus:

$$\bar{x} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

(Persamaan 3)

di mana:

- \bar{x} = rata-rata DDF setiap kelompok yang dihitung dari sampel
- $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ = angka baku yang diperoleh dari tabel normal pada tingkat signifikansi α
- s = standar deviasi DDF setiap kelompok yang dihitung dari sampel
- N = ukuran populasi (jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia)
- n = ukuran sampel
- μ = rata-rata DDF populasi yang akan diestimasi

Untuk membedakan derajat desentralisasi pada pemerintah kabupaten dan kota digunakan *two independent sample t-test* dengan hipotesis penelitian:

H₁: Diduga derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi daripada derajat desentralisasi kabupaten

Secara teknis pengujian dilakukan dengan uji satu arah perbedaan rata-rata derajat desentralisasi fiskal pada sampel kabupaten dan kota secara parametrik. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal daerah dilakukan uji signifikansi parameter regresi baik secara parsial maupun secara bersama-sama dengan menggunakan uji t dan uji F.

Adapun model regresi berganda yang akan diestimasi adalah:

$$(DDF)_i = \beta_0 + \beta_1(SI)_i + \beta_2(ASS)_i + \beta_3(IR)_i + \beta_4(ST)_i + \beta_5(OA)_i + \varepsilon$$

(Persamaan 4)

di mana:

- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %)
- SI = *share* sektor industri terhadap total PDRB (dalam %)
- ASS = total asset (dalam rupiah)
- IR = *intergovernmental revenue* (rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan, dalam %)
- ST = *dummy variable* status pemerintah (0 = kabupaten, 1 = kota)
- OA = *dummy variable* hasil opini audit (1= WTP, 0 = lainnya)
- ε = *error term*
- i = kabupaten/kota

Melalui teknik analisis regresi dapat diidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap derajat kemandirian keuangan daerah dengan rancangan hipotesis sebagai berikut:

- H₂: Diduga *share* sektor industri pada total PDRB berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal
- H₃: Diduga kekayaan/aset daerah berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal
- H₄: Diduga tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal
- H₅: Diduga status daerah berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal
- H₆: Diduga hasil opini audit berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

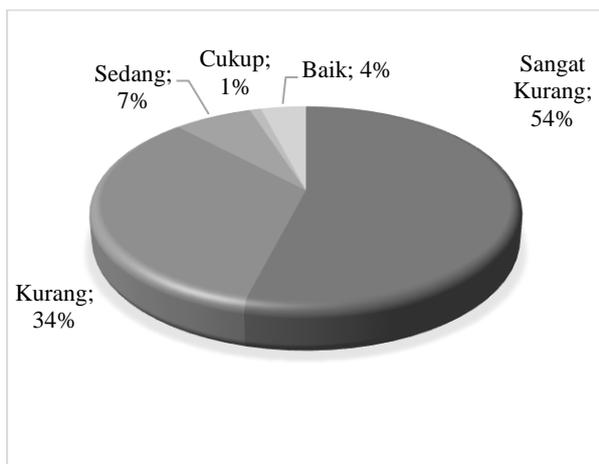
Derajat desentralisasi fiskal mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali potensi keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri dan terhimpun dalam PAD. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:40).

Mengingat kian pentingnya kemampuan keuangan pemerintah daerah pada era

otonomi saat ini, beberapa kajian perlu dilakukan diantaranya memperkirakan peta derajat desentralisasi fiskal, melakukan pengujian atas dugaan bahwa derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota lebih tinggi daripada pemerintah kabupaten serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal.

A. Estimasi Peta Derajat Desentralisasi Fiskal seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

Klasifikasi atas perhitungan angka derajat desentralisasi fiskal pada 100 kabupaten/kota yang dijadikan sampel menghasilkan 5 kelompok kriteria yaitu “Sangat Kurang”, “Kurang”, “Sedang”, “Cukup” dan “Baik”. Hasil klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Hasil Klasifikasi Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Sampel tahun 2019
Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Untuk melengkapi gambaran peta derajat desentralisasi fiskal seluruh kabupaten/kota dihitung pula ukuran deskriptifnya. Oleh karena klasifikasi hanya menghasilkan 5 kelompok kabupaten/kota maka ukuran deskriptif pun hanya dihitung untuk 5 kelompok.

Hasil klasifikasi dan perhitungan ukuran deskriptif selanjutnya digunakan untuk mengestimasi derajat desentralisasi fiskal 508 kabupaten/kota di Indonesia. Tabel 4 memperlihatkan hasil estimasi proporsi dan rata-rata derajat desentralisasi fiskal setiap kelompok pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

Tabel 4. Hasil Estimasi Proporsi dan Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal 508 Kabupaten/Kota

Kelompok DDF	Hasil Estimasi	
	Proporsi (%)	Rata-rata (%)
Sangat Kurang	45,24 – 62,76	5,57 – 6,51
Kurang	25,67 – 42,33	13,10 – 14,12
Sedang	2,51 – 11,49	24,77 – 25,61
Cukup	1	38,02
Baik	0,56 – 7,44	44,29 – 45,25

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Catatan: DDF = derajat desentralisasi fiskal

Hasil estimasi pada tabel 4 menunjukkan adanya dominasi kabupaten/kota dengan kriteria desentralisasi fiskal yang “Sangat Kurang” dan “Kurang”. Sebaliknya kabupaten/kota yang termasuk kriteria “Sedang”, “Cukup” dan “Baik” masih lebih sedikit. Bahkan dari pengamatan yang dilakukan terhadap sampel tidak ditemukan adanya kabupaten/kota dengan kriteria “Sangat Baik”. Kenyataan ini mengindikasikan sangat sedikitnya kabupaten/kota yang berhasil berotonomi.

Aturan Bank Dunia menyatakan bahwa suatu daerah dapat menjadi daerah otonom apabila rasio PAD terhadap TPD minimal 20% (Hasan, 2014:33) atau minimal memenuhi kriteria “Sedang”. Oleh karena itu jika dihitung dalam angka absolut diperkirakan antara 13 sampai 58 kabupaten/kota termasuk kriteria desentralisasi “Sedang”, 5 termasuk kriteria “Cukup”, dan antara 3 sampai 38 termasuk kriteria “Baik”. Dengan kata lain menjelang 20 tahun otonomi daerah diberlakukan di Indonesia secara keseluruhan kabupaten/kota yang bisa dikatakan daerah otonom antara 6,39% sampai dengan 17,71% atau setara dengan 32 sampai 90 kabupaten/kota saja. Angka derajat desentralisasi dari kabupaten/kota tersebut berkisar antara 10,33% sampai 13,31%, suatu angka yang hanya memenuhi kriteria desentralisasi “Kurang”.

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa hasil penelitian sejenis yang umumnya dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih kecil seperti ditunjukkan oleh Sumual (2017) dengan kasus di kota Tomohon sedangkan Titahena (2019) di kota Ambon. Adapun untuk *level* kabupaten/kota dapat ditunjukkan oleh penelitian Hasan

(2014) dan Hardiana (2020) untuk sampel di kabupaten/kota di Jawa Barat serta penelitian Fitriani (2014) pada kabupaten/kota di provinsi Bali. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menghasilkan kesimpulan yang relatif sama yakni masih lemahnya kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

B. Perbedaan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten dan Kota

Kepemilikan sumber daya yang lebih baik yang umumnya dimiliki pemerintah kota memungkinkan pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih. Adapun untuk memperkuat dukungan atas pernyataan tersebut sekaligus menjawab hipotesis pertama penelitian ini maka dilakukan *two independent sample t-test* dengan bantuan program SPSS 20.0. Tabel 5 memperlihatkan ukuran deskriptif derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota, di mana meskipun lebih bervariasi namun rata-rata derajat desentralisasi kelompok kota lebih tinggi.

Tabel 5. Hasil Analisis Deskriptif

		N	Mean	Std. Deviation
DDF	Kabupaten	81	9,23493	6,03748982
	Kota	19	22,8643	13,18751

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 20.0, 2021

Selanjutnya hasil *two independent sample t-test* yang disajikan pada Tabel 6 menyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 5%, artinya hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi daripada kabupaten, tidak ditolak.

Tabel 6. Hasil Pengujian Perbedaan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten dan Kota

		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
Derajat Desentralisasi	Equal variances assumed	-6,807	98	0,000
	Equal variances not assumed	-4,398	19,803	0,000

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 20.0, 2021

Hasil pengujian ini memberi sinyal bahwa pemerintah kota lebih mampu melaksanakan amanat desentralisasi. Karakteristik masyarakat kota yang lebih modern dengan struktur pendapatan yang lebih tinggi cenderung memperkuat kontrol sosial (Abdullah dalam Suryaningsih, 2016). Meningkatnya pengetahuan masyarakat kota seiring dengan tuntutan keterbukaan pada era globalisasi turut memperkuat kontrol sosial yang berujung pada tuntutan kepatuhan standar akuntansi pemerintah daerah.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil beberapa studi terkait desentralisasi fiskal dalam hubungannya dengan karakteristik daerah, dan hasil opini audit, penelitian ini mencoba menyusun model hubungan tersebut melalui estimasi model regresi berganda seperti ditunjukkan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Estimasi Model dan Pengujian Parameter secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	16,638	3,969	4,191	0,000
SI	0,111	0,037	3,016	0,003
ASS	1,279E-012	0,000	6,661	0,000
IR	-0,182	0,043	-4,211	0,000
ST	8,211	1,327	6,039	0,000
OA	2,815	1,360	2,121	0,037

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 20.0

Estimasi model hubungan antar variabel sebagaimana dinyatakan Persamaan 4 dapat ditulis sebagai berikut:

$$(DDF)_i = 16,638 + 0,111(SI)_i + 1,279 \times 10^{-12}(ASS)_i - 0,182(IR)_i + 8,211(ST)_i + 2,815(OA)_i$$

Dari hasil estimasi nampak secara parsial semua variabel berpengaruh signifikan. Artinya bahwa derajat desentralisasi fiskal daerah ditentukan oleh karakteristik daerah yang tercermin dari *share* sektor industri pada pembentukan PDRB, kekayaan/asset daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat, serta status pemerintahan daerah dan hasil opini audit

Kecuali tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat yang

berhubungan negatif, *share* sektor industri pada pembentukan PDRB, kekayaan/asset daerah, hasil opini audit serta status pemerintahan daerah memiliki arah hubungan yang positif dengan derajat desentralisasi fiskal.

Peningkatan peran sektor industri dalam pembentukan PDRB sebesar 1% mampu meningkatkan derajat desentralisasi 0,111%. Kenyataan ini membuka peluang bagi sektor industri untuk memperluas perannya dalam rangka penguatan desentralisasi. Sektor industri ditengarai sebagai sektor yang paling dinamis dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah karena sektor industri terdiri dari sub-sub sektor yang menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah tertentu (Anwar, 2007).

Selain peran sektor industri, kekayaan/asset yang dimiliki daerah juga turut menentukan derajat desentralisasi fiskal daerah. Dari hasil estimasi model didapat bahwa peningkatan asset 1 triliun rupiah mampu mendorong angka derajat desentralisasi hingga 1,279%. Sebagai pemegang peran utama dalam pelayanan publik, daerah harus dapat memenuhi kebutuhan layanan masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan dimaksud memerlukan dukungan asset yang dapat menjamin kelancaran layanan yang pada gilirannya menjamin kesejahteraan masyarakat (Ilmiyyah, 2017). Semakin besar asset yang dimiliki daerah maka kegiatan operasional dan layanan masyarakat semakin lancar sehingga meningkatkan akselerasi keberhasilan desentralisasi.

Hingga 2021, tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, dan hal tersebut menjadi penghambat penguatan desentralisasi. Menurut hasil estimasi, penambahan transfer pusat sebesar 1% secara nyata berpotensi menurunkan derajat desentralisasi 0,182%. Transfer pemerintah pusat dialokasikan dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daerah. Dengan kata lain, transfer

pemerintah pusat diberikan untuk menutupi kekurangan pemanfaatan PAD (Ilmiyyah, 2017).

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa status pemerintah daerah diduga berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Dari hasil estimasi diperoleh keterangan bahwa *ceteris paribus* derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kota mencapai angka 24,839% sedangkan pada pemerintah kabupaten 16,638%. Kontrol sosial yang lebih kuat yang diterima pemerintah kota terjadi akibat karakteristik masyarakat kota yang lebih maju dan modern (Adullah dalam Suryaningsih, 2016).

Pemeriksaan keuangan yang setiap tahun dilakukan BPK atas LKPD dilengkapi dengan opini auditor. Hasil penelitian Prayitno (2013) menunjukkan bahwa hasil opini audit WTP memberi indikasi derajat desentralisasi fiskal sebesar 19,453% sedangkan hasil opini lainnya sebesar 16,638%. Berdasarkan temuan tersebut, Prayitno merekomendasikan supaya daerah senantiasa meningkatkan kualitas laporan dan kinerja keuangan yang tercermin pada hasil opini audit.

Pengujian parameter untuk mengetahui pengaruh bersama karakteristik daerah, asset daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat serta status daerah dan hasil opini audit terhadap derajat desentralisasi fiskal dilakukan dengan uji F. Hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 8 memperlihatkan angka F-hitung yang cukup besar dan menjadi alasan tidak menolak hipotesis penelitian bahwasanya terdapat pengaruh bersama karakteristik daerah (*share* sektor industri terhadap total PDRB), aset daerah, tingkat ketergantungan serta status pemerintah daerah dan hasil opini audit terhadap derajat desentralisasi fiskal.

Tabel 8. Hasil Pengujian Parameter secara Bersama

Model	Sum of Squares	df	F	Sig.
Regression	6.601,679	5	53,876	0,000 ^b
Residual	2.303,665	94		
Total	8.905,344	99		

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 20.0

Berdasarkan tabel 8, hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa percepatan

desentralisasi dapat terjadi melalui pergeseran struktur perekonomian daerah ke arah yang lebih modern, memperluas asset daerah, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan/transfer pemerintah pusat serta memperbaiki kualitas laporan keuangan yang dilakukan secara simultan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa temuan dari hasil estimasi dan pembahasan yang merujuk pada rumusan permasalahan yang dikemukakan dapat disimpulkan:

1. Diantara 508 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) diperkirakan baru sekitar 32 sampai 90 daerah saja yang sudah termasuk katagori otonom, sedangkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal seluruh kabupaten/kota diperkirakan berada pada angka 10,33% sampai dengan 13,31%.
2. Derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dibanding kabupaten.
3. Karakteristik daerah yang diwakili oleh kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), total aset, tingkat ketergantungan, status pemerintah daerah dan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

V. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian yang secara ringkas disampaikan pada kesimpulan maka diajukan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Akselerasi keberhasilan otonomi daerah melalui peningkatan derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten yang umumnya memiliki karakteristik tradisional diantaranya dapat dilakukan melalui kebijakan modernisasi pada berbagai sektor ekonomi serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia di perdesaan yang diharapkan memberikan kontrol sosial yang lebih kuat.
2. Rendahnya angka derajat desentralisasi fiskal dapat diperbaiki melalui

optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan asset daerah yang berpotensi meningkatkan PAD sehingga mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan cara meningkatkan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

REFERENSI

- Anwar, M., & Nidar, H. S. R. (2007). Identifikasi Sektor Industri dan Peranannya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut (Industrial Sectors and its Role in Enhancing Domestic Income – Case : Kabupaten Garut) 1. *Laporan Akhir Penelitian LITMUD UNPAD Tahun Anggaran 2007*, 1–16.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *IHPS I Tahun 2020 Ikhsisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020*. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah), 2018-2020*. Data Keuangan. Retrieved March 25, 2021, from <https://www.bps.go.id/indicator/13/78/7/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>
- Fitriani, Ni Luh Putu, Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Penilaian kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8.1, 211 – 227.
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 197–210.

- Hasan, P. F. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(November), 218–240.
- Ilmiyyah, Nyayu Miftahul; Dewata, Evada; Sarikadarwati, S. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5.1, 147–162.
- Kuncoro, M. (2004a). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M. (2004b). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.
- Nugraha, Y. N. (2019). *Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- Prayitno, Aditya Indra dan Nova Novita. (2013). Local Government’s Revenue, Audit Opinion of BPK and Financial Performance of Local Government: Indonesia Evidence. *Proceeding of The 3 Rd Annual International Conference Syiah Kuala University (AIC Unsyiah, 2013)*.
- Sumual, Christian D., Lintje Kalangi, N. Y. . G. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon. *Riset Akuntansi Going Concern*, 2, 782 – 791.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Suryaningsih, Ni Made., S., & Ardhani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15.2, 1453–1481.
- Titahena, C. J. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah dalam Mendukung Otonomisasi Daerah di Pemerintahan Kota Ambon. *Soso-Q Jurnal Manajemen*, 7.1, 1–12.